



Buletin

Parlementaria

Nomor 990/II/2018 • Januari 2018

**Pemerintah Harus
Seimbangkan Harga Bera**

**DPR Dorong Hukuman
Bagi Pelaku Predator Anak**



**PELAKSANAAN
PILKADA
2018
HARUS BERKUALITAS**

**TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN**



Pelaksanaan Pilkada 2018 Harus Berkualitas



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan secara serentak pada Juni 2018 mendatang harus dilaksanakan secara berkualitas, karena Pilkada merupakan sarana kedaulatan rakyat. Demikian menjadi salah satu kesimpulan rapat konsultasi antara DPR RI dengan Pemerintah yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).

“DPR dan instansi pemerintah melakukan rapat konsultasi, agar ada penjelasan dari sejumlah pihak, dan kita mempunyai frekuensi yang sama dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. Sehingga Pilkada berjalan adil dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” jelas Fadli.

Rapat konsultasi ini diikuti Pimpinan DPR RI Agus Hermanto dan Fahri Hamzah, Pimpinan Komisi II DPR, seluruh Pimpinan Komisi III DPR, Pimpinan Fraksi DPR, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Jaksa Agung Pidana Umum (Jampidum).

Lebih lanjut Fadli mengatakan, rapat

konsultasi juga menyepakati adanya pemetaan yang lebih komprehensif terhadap daerah yang berpotensi rawan konflik dan keamanan. “Kami mendukung langkah-langkah yang telah, sedang serta akan dilakukan Kapolri,” imbuh Fadli.

Disepakati juga perlu dilakukannya koordinasi yang lebih solid antar kementerian dan lembaga dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, baik dalam pelaksanaan tiap tahapan maupun dalam hal penegakan hukum atas berbagai hal yang terjadi, guna mengefektifkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Semua aparat Aparat Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri senantiasa menjaga

netralitas dan menjaga profesionalitas serta menghindari *abuse of power*. Semua pihak yang berkompetisi maupun penyelenggara untuk mematuhi peraturan pelaksanaan kampanye. Hal itu guna mencegah politik uang, kampanye hitam, isu SARA yang dapat mengancam kesatuan dan persatuan,” papar Fadli membacakan kesimpulan.

Selain itu, seluruh peserta rapat menyepakati bahwa penyelenggara Pilkada, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu bersikap dan bertindak secara lebih profesional agar penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dapat berlangsung dengan baik.

“Segala hambatan teknis dan administrasi termasuk penganggarannya dapat segera diselesaikan untuk kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. Dan terakhir, Pemerintah dan penyelenggara pemilu diminta menangani keterlibatan media massa dan sosial secara antisipatif dan profesional serta mengutamakan prinsip keadilan dan netralitas,” tambah Fadli. ■(nm/sj)

Revisi UU Dana Desa Harus Perhatikan Kesejahteraan Ketua RT dan RW

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyayangkan kesejahteraan Ketua RT dan RW yang kurang diperhatikan di tengah kucuran dana desa yang mencapai satu miliar rupiah. Untuk itu, Taufik berharap jika ada revisi Undang-Undang (UU) Dana Desa, keterlibatan Ketua RT dan RW harus menjadi bagian yang perlu diperhatikan.



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

“Saya sangat prihatin, waktu reses kemarin, saya masih menemukan ada Ketua RT dan RW yang mendapatkan intensif hanya Rp. 300 ribu per tahun, artinya Rp 25 ribu perbulan, bayangkan saja. Belum lagi dana intensif itu juga dikenakan pajak,” ujar Taufik saat diskusi dengan awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1).

Padahal, seharusnya Ketua RT dan RW masuk dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Untuk itu, pihaknya akan bertemu dengan Menteri Keuangan meminta agar tunjangan dan intensif Ketua RT dan RW dibebaskan dari pajak.

“Intensif yang sangat kecil itu membuat Ketua RT atau RW melakukan pekerjaan lain seperti tukang parkir, tukang becak dan lain-lain. Ini kan sangat memprihatinkan. Karena kita tahu Indonesia itu, tanpa Ketua RT dan RW tidak akan jalan,” tegasnya seraya mengatakan nantinya Revisi UU Dana Desa perlu perhatikan kesejahteraan Ketua RT dan RW.

Lebih lanjut Politisi P-PAN itu mengatakan, revisi UU Dana Desa merupakan langkah efektif bagi pemerintah untuk pemerataan hasil pembangunan. Selain itu, pihaknya juga sangat setuju alokasi dana desa difokuskan pada sektor padat karya atau yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat di desa.

Dia mencontohkan padat karya adalah proyek infrastruktur. Proyek itu akan dikerjakan secara swakelola. Pekerja proyek diserap dari warga setempat. Dengan demikian dana desa tidak hanya digunakan untuk membeli bahan material infrastruktur saja, melainkan juga untuk membayar honor pekerja.

“Tujuan UU Desa itu bagaimana pemerintah bisa pemeratakan hasil pembangunan pada masyarakat, aspek keadilan, keberpihakan kepada masyarakat itu yang diinginkan pemerintah, tinggal bagaimana mengimplementasikannya,” jelasnya. ■ (rnm/sc)

Buletin
Parlementaria
Nomor 990/II/2018 • Januari 2018

Pemerintah Harus Seimbang Harga Bera
DPR Dorong hukuman Bagi Pelaku Predator Anak

PELAKSANAAN PILKADA 2018 HARUS BERKUALITAS

TIDAK DIPERJUAL BELIKAN

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi
SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati,
Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi,
Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno PD Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO
Bagus Mudjihariyanto

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)

ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Mujiono

PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Remon,
Yuliana Puspita, Ifan
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Pimpinan DPR Minta Seluruh AKD Segera Selesaikan Pembahasan RUU

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 dengan menyampaikan pidato pembukaan. Dalam sambutannya, dia minta kepada seluruh Alat Kelengkapan Dewan untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU. "Mengingat Masa Persidangan ini singkat, Pimpinan meminta Komisi, Pansus, dan Badan Legislasi untuk segera menyelesaikan penyusunan, harmonisasi dan pembahasan RUU," ujar Fadli di hadapan Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1).

Ia menyampaikan, khusus dengan harmonisasi RUU, agar memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI yang menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari. Pimpinan juga meminta komitmen dan dukungan pemerintah untuk menyelesaikan RUU yang telah ditetapkan menjadi prioritas.

Selain itu, Fadli juga menjelaskan, hasil dari kunjungan kerja dapat ditindaklanjuti melalui berbagai kegiatan DPR, seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kegiatan lainnya dalam masa persidangan ini. Terkait dengan hal ini, Pimpinan DPR mengingatkan kepada seluruh anggota dewan untuk menyampaikan laporan hasil kunjungan kerja tersebut kepada fraksi masing-masing untuk dapat ditindaklanjuti.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, memasuki masa sidang ini, DPR akan melanjutkan pembahasan terhadap 21 RUU Prioritas 2018 dan tiga RUU Kumulatif Terbuka yang diharapkan dapat diselesaikan pada masa sidang ini.

Selain itu, DPR juga akan melanjutkan pembahasan, terhadap enam RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2018 yang sedang dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi. Disamping itu masih terdapat 11 RUU yang sedang dalam proses penyusunan di DPR.

■ (eko/sc)



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Mencalonkan Pilkada, Legislator Harus Mundur

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, Anggota DPR yang ikut serta dalam pencalonan Pilkada 2018 harus mengundurkan diri dari jabatannya. Mengingat, hingga tahapan pendaftaran calon Pilkada dimulai, belum ada satu pun anggota DPR yang mengajukan pengunduran diri.

“Sampai dengan hari ini, belum ada anggota DPR yang mengundurkan diri terkait pencalonan Pilkada, karena memang keterkaitan dengan hukum, ketentuan Keputusan MK,” ujar Taufik Kurniawan usai diskusi dengan awak media, Selasa (9/1) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, dinyatakan tegas anggota DPR, DPD, dan

DPRD harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta pemilihan kepala daerah. Namun dalam ketentuannya, surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan sudah harus dibuat saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Mungkin nanti, karena itu memang kewajiban. Kalau pun misalnya tak mengajukan di DPR secara resmi, nanti

kena verifikasi di KPU malah digugurkan, kan sayang,” kata Taufik.

Dalam Pilkada 2018, sejumlah nama Anggota DPR ikut mencalonkan diri diantaranya Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman di Pilgub NTT, Anggota Fraksi PDIP TB Hasanuddin di Pilgub Jawa Barat, serta anggota Fraksi Nasdem Viktor Laiskodat di Pilgub NTT.

Dalam kesempatan tersebut sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan tersebut membagikan buku yang ditulisnya, berjudul *Inklusivisme Pembangunan Pedesaan di era Otonomi*. ■ *(hs/sr)*



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

Foto: Rumi/od

Golkar Diharapkan Segera Putuskan Ketua DPR Definitif

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap Fraksi Partai Golkar segera memutuskan Ketua DPR definitif. Fahri berpandangan jabatan Ketua DPR tidak boleh lama dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). “Memang sebaiknya Ketua DPR itu tidak boleh terlalu lama di Plt,” kata Fahri usai melakukan keterangan pers di ruang kerjanya, Selasa (9/1).

Fahri menjelaskan kepada wartawan, Pimpinan DPR telah mengirim surat ke Fraksi Golkar agar segera menentukan pengganti Setya Novanto yang kini berstatus terdakwa dalam kasus e-KTP. Saat ini, ada banyak hal yang akan diputuskan di DPR dan membutuhkan kompromi dari semua pihak, termasuk dari Fraksi Golkar di kursi Pimpinan DPR.

Saat ini dikabarkan, surat dari Fraksi Golkar terkait pergantian Ketua DPR belum masuk ke Pimpinan DPR sehingga pihaknya masih terus menunggu. “Kalau ada permintaan melantik Ketua DPR hari ini, pagi ini harusnya kami rapim dulu sampai sore, kemarin tidak ada. Tadi malam juga tidak ada. Jadi, kalau ada surat pagi ini, misalnya, minta Ketua DPR dilantik segera tentu kami prioritaskan,” lanjut Fahri.

Fahri menjabarkan Pimpinan DPR akan segera memproses surat Fraksi Partai Golkar terkait pergantian Ketua DPR,

namun selama surat itu belum ada maka Pelaksana Tugas Ketua DPR tetap dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon. ■ (bs/sc)

Pimpinan DPR telah mengirim surat ke Fraksi Golkar agar segera menentukan pengganti Setya Novanto yang kini berstatus terdakwa dalam kasus e-KTP. Saat ini, ada banyak hal yang akan diputuskan di DPR dan membutuhkan kompromi dari semua pihak, termasuk dari Fraksi Golkar di kursi Pimpinan DPR.



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Foto: Andri/od



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menerima Sekjen AIPA Isra Sunthornvut

Twinc: Oidjif/af

Indonesia Akan Usulkan Amandemen Statuta Konsensus AIPA

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menilai paham konsensus sudah tidak relevan lagi bagi Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Karenanya, Indonesia akan mengusulkan perubahan statuta konsensus dalam sidang AIPA mendatang.

“Saya kira sudah tidak cocok lagi AIPA menganut paham konsensus karena melihat dinamika yang terjadi di kawasan kita sendiri. Ini baru usulan Indonesia, kita akan sampaikan kepada Sekjen AIPA dan akan disampaikan dalam sidang General Assembly ke depan,” ungkap Nurhayati usai menerima Sekjen AIPA Isra Sunthornvut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Rabu (9/1).

Ia menjelaskan, organisasi parlemen se-Asia Tenggara ini sudah tidak cocok lagi menganut konsensus, khususnya di era demokrasi. Pasalnya, berkaca dari

Sidang Umum AIPA di Manila beberapa waktu lalu, resolusi Indonesia terkait krisis kemanusiaan etnis Rohingya ditolak, karena Myanmar sendiri tidak setuju.

“Yang lain setuju, kecuali Myanmar dan karena statuta AIPA mengharuskan konsensus, resolusi tersebut tidak bisa dilaksanakan,” papar politisi dari F-Demokrat ini.

Nurhayati menambahkan, lebih baik AIPA menerapkan mekanisme voting menggantikan konsensus. Menurutnya, mekanisme voting akan lebih efektif

untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan internal ASEAN.

“Di Inter-Parliamentary Union (IPU) pun, tidak lagi konsensus melainkan berdasarkan voting. Apabila tidak bersepakat, suara terbanyaklah yang menang. Nah, kita ingin di era sekarang ini supaya mengamandemen statuta, khususnya pengambilan keputusan di dalam kebijakan yang pro, sehingga bisa diakui menjadi kesepakatan bersama anggota Asean,” jelasnya.

Sisi lain, politisi dari daerah pemilihan Jawa Timur V ini juga mendorong program-program kerja AIPA terkait isu *gender mainstreaming*. Dengan harapan, keterwakilan perempuan dapat semakin meningkat di segala bidang, tidak hanya di legislatif tetapi juga eksekutif maupun yudikatif. ■_(ann/sj)



Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian

Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan bagi anggota TNI-Polri yang masih aktif, harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pilkada. “Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada jelas mengatur jika ada TNI dan Polri yang masih aktif dan mencalonkan diri di Pilkada harus mundur sejak ditetapkan sebagai calon. Pengaturan ini bisa

Calon dari TNI-Polri Aktif Harus Mundur saat Penetapan

Tahapan pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 mulai dibuka hari ini, 8 hingga 10 Januari. Beberapa kandidat berasal dari berbagai latar belakang profesi, termasuk anggota aktif TNI dan Polri.

dilihat di pasal 7 ayat (2) huruf t,” jelas Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (8/1).

Menurut politisi Golkar ini, pengaturan dalam UU Pilkada tersebut sejalan dengan pengaturan yang diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.

“Kalau di UU Polri diatur di Pasal 28 ayat (3) bahwa anggota Kepolisian NRI dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian. Sedangkan di UU TNI diatur di Pasal 47, bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,” lanjut Hetifah.

Hetifah juga menegaskan bahwa kewajiban harus mundur dari keanggotaan TNI-Polri ketika mencalonkan diri di Pilkada merupakan penegasan TNI-Polri dilarang berpolitik

praktis. Ketika ada anggota TNI-Polri yang masih aktif dan ingin maju dalam Pilkada, maka konsekuensinya harus mundur.

“Ini (pengunduran) konsekuensinya. Kita ingin TNI-Polri netral di Pilkada maupun Pemilu,” tegas Hetifah.

Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan Kepemiluan ini meminta aparat keamanan baik TNI-Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan pendaftaran Paslon, kampanye hingga hari H pemungutan suara. Hetifah juga mendorong peningkatan kerja sama dengan TNI-Polri dengan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis.

“Bawaslu RI kan sudah memetakan daerah rawan di Pilkada 2018. Ya, kita minta kerja sama lebih intens antara penyelenggara Pemilu dengan aparat keamanan,” pungkas Hetifah. ■ (rnm/sc)

Soal Ketua DPR, Golkar Tunggu Revisi UU MD3

Untuk pengisian jabatan Ketua DPR RI, Fraksi Golkar menginginkan setelah revisi UU MD3. Golkar ingin mengambil satu langkah, tetapi dua persoalan bisa selesai. Dua masalah itu adalah adanya usulan penambahan kursi Wakil Ketua DPR dari PDI Perjuangan dan pengisian jabatan Ketua DPR yang kosong setelah ditinggalkan Setya Novanto.

Menurut Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji kepada pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1), penambahan kursi Wakil Ketua DPR untuk Fraksi PDI Perjuangan yang merupakan bentuk penghormatan kepada pemenang pemilu 2014.

Sehubungan dengan kedua persoalan tersebut, lanjut Sarmuji, Golkar akan mengambil satu langkah tetapi dua persoalan itu bisa selesai. “Kita sudah sampaikan kepada Pimpinan Baleg melalui Wakil Ketua dari Golkar, dengan harapan supaya dapat menyelesaikan



Anggota Komisi XI DPR RI Sarmuji

revisi UU MD3 dalam waktu secepatnya. Karena tinggal *finishing* saja,” jelasnya.

Karena tinggal *finishing* maka selanjutnya proses pengambilan keputusan ada opsi-opsi, dan diambil keputusan. “Masa sidang sekarang ini harus bisa, harus masa sidang ini. Bahkan

kalau bisa Baleg menyelesaikan revisi UU MD3 dalam waktu satu minggu,” tandas anggota Komisi XI DPR ini.

Sejauh ini ada tiga nama yang mencuat diajukan sebagai Ketua DPR yakni Anggota DPR Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Badan Anggaran

DPR Azis Samsudin dan Ketua Komisi III Bambang Soesatyo. Sarmuji juga menambahkan bahwa, dulu menyelesaikan RUU Pilkada satu minggu selesai. Apalagi revisi UU MD3 ini tinggal mengambil keputusan saja, sehingga pengisian jabatan Ketua DPR segera bisa dilakukan. ■ (mp/sc)

BSSN Dituntut Dapat Antisipasi Serangan Siber di Tahun Politik

Tahun 2018 ini ada 171 daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak, tepatnya pada 27 Juni mendatang. Setelah itu dilanjutkan pada 2019 diselenggarakan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Serentak. Ini merupakan tahun politik dan ujian demokrasi bagi Indonesia.

Menanggapi kompetisi politik ini, Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo mengharapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengantisipasi segala macam serangan dan ancaman siber yang bisa merusak demokrasi serta mengancam Kebhinekaan bangsa. Dia mengatakan ada banyak harapan terhadap pembentukan BSSN. Namun, menurut dia, masih ada sejumlah hal yang harus disiapkan agar lembaga tersebut dapat berfungsi secara maksimal.

“Kepala BSSN harus bergerak cepat. Tapi sekali lagi netralitas dan independensi itu penting,” ujar Roy dalam sambungan telpon dengan Parlemen, Senin (8/1).

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 potensi serangan siber sangat mungkin terjadi. Ia meminta kepada Kepala BSSN untuk bergerak cepat menyiapkan infrastruktur lembaganya tersebut, seperti regulasi dan struktur organisasi di BSSN.

Ia menekankan DPR sangat mendukung BSSN untuk bisa berfungsi secara maksimal. Komisi I pun akan menjadwalkan rapat kerja dengan Kepala BSSN setelah pembukaan Masa Sidang pada Januari 2018. “Kami dari DPR siap mendukung, karena ini (BSSN) keniscayaan, harus ada,” tandasnya.



Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo

Foto: Agkai/ed

Dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 potensi serangan siber sangat mungkin terjadi. Ia meminta kepada Kepala BSSN untuk bergerak cepat menyiapkan infrastruktur lembaganya tersebut, seperti regulasi dan struktur organisasi di BSSN

Serangan siber dimungkinkan muncul saat berlangsungnya kontestasi Pilkada Serentak 2018. BSSN pun harus menjamin bakal mengantisipasi serangan siber tersebut. Karena membangun pertahanan siber secara maksimal sangat penting.

BSSN merupakan revitalisasi Lembaga Sandi Negara dengan tambahan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo. BSSN memiliki tugas dan fungsi di bidang persandian serta keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi. ■ (eka/sc)

Komisi IV Panggil Kementan Terkait Harga Bahan Pangan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena memberi catatan kritis terhadap Kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Palsanya, sebelum reses DPR RI terakhir yakni pada pertengahan bulan Desember lalu, sempat diinformasikan bahwa Bulog memiliki stok beras yang cukup, yakni di atas 2 juta ton.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena

Namun kenyataannya, sampai awal Januari tahun 2018 ini stok beras di Bulog tidak lebih dari 1 juta ton. Hal itulah yang menurutnya ikut menyebabkan melambungnya harga

beras di pasaran dalam beberapa pekan terakhir ini.

“Kondisi ini membuat *supply* beras ke pengecer menjadi relatif terbatas. Dan pada akhirnya beras

di pasaran juga sedikit berkurang. Sementara *demand* (permintaan) dari masyarakat terhadap beras relatif normal (seperti bulan-bulan sebelumnya). Hal inilah yang membuat harga di pasaran meningkat dan akhirnya membuat masyarakat menjerit,” papar Michael usai Sidang Paripurna di Senayan, Jakarta, Selasa (8/1).

Ke depan, dilanjutkan Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, pihaknya akan mengundang dan mempertanyakan kondisi tersebut kepada Menteri Pertanian, termasuk Dirut Perum Bulog. Karena selama ini keduanya selalu optimis stok beras relatif tersedia, sehingga masyarakat diminta tidak khawatir atau takut dengan ketersediaan beras di pasaran untuk ke depannya.

Namun ucapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang saat ini terjadi di lapangan atau di masyarakat. Tidak hanya itu, pihaknya juga akan mendorong Menteri Pertanian dan Bulog bersama elemen pemerintahan lainnya untuk segera mengatasi melonjaknya harga bahan pangan seperti beras tersebut. ■(ayu/sc)

Pemerintah Harus Seimbangkan Harga Beras

Melonjaknya harga beras kelas premium hingga Rp 12 ribu, menuntut pemerintah agar melakukan intervensi harga. Ini penting untuk menyeimbangkan harga beras di pasaran. Sementara Bulog sendiri dengan keterbatasan kuantitasnya tak mampu melawan gejolak harga yang terjadi.

Dengan kondisi ini rakyat tentu yang paling dirugikan. Pedagang dan pengusaha yang mendulang untung besar. “Pemerintah harus intervensi agar harga tidak melambung luar biasa,” komentar

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azman Natawijana saat ditemui di DPR sebelum mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Selasa (9/1).

Menurut Azman, menghadapi situasi ini, Bulog tak mampu membeli beras



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azman Natawijana

petani karena ada batasan harga yang ditetapkan pemerintah. Dengan begitu, swasta yang mampu membeli dan menjualnya dengan harga tinggi. Ini memang jadi dilema Bulog. Dan Bulog tak mampu melawan harga swasta.

“Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan baru terkait penugasan kepada Bulog. Kami cenderung pemerintah pasti akan memasukkan beras impor. Tapi, jangan sampai

merugikan petani. Beras impor juga harus berkualitas premium. Kalau tidak, itu tidak berdampak positif terhadap kebutuhan beras dalam negeri. Harus ada keseimbangan harga dan dihitung secara cermat, sehingga beras impor tidak melimpah dan menurunkan harga petani,” seru politisi dari Jatim III tersebut.

Ditambahkannya, pemerintah harus berhitung dengan cermat berapa

kebutuhan volume beras di dalam negeri. Soal penyebab kenaikan harga beras akhir-akhir ini, ia mengaku belum mengetahui sepenuhnya. Mungkin ada kegagalan panen atau puso, sehingga produksi petani menurun. Dan ketika pasokan berkurang, tentu menyebabkan harga naik. “Pemerintah harus menyampaikan, apakah ada puso. Kalau ada puso harus ada jalan keluar,” ucapnya lagi. ■ (mh/sc)

Penenggelman Kapal Pencuri Ikan Sudah Tidak Relevan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi memberikan apresiasi dan dukungan terhadap kebijakan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan agar tidak lagi menenggelman kapal pencuri ikan karena sudah memberikan efek jera.

Menenggelman kapal pencuri ikan menurutnya sudah tidak relevan, sehingga saat ini sudah saatnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bisa lebih memberikan manfaat bagi nelayan. Daripada ditenggelman, lebih baik kapal pencuri ikan tersebut diberikan kepada nelayan lokal agar lebih bermanfaat.

“Saya setuju dengan Menko Kemaritiman agar jika ada pelanggaran karena *illegal fishing* dalam bentuk pencurian ikan di wilayah perairan laut Indonesia, sebaiknya tidak usah ditenggelman kapalnya. Namun kapal itu disita menjadi milik negara dan dihibahkan ke nelayan Indonesia,” ujar Viva Yoga kepada Parlemenaria sebelum menghadiri Rapat Paripurna, Selasa (9/1).

Menurut Politisi PAN ini, kapal pencuri ikan yang ditenggelman juga merupakan kapal dengan ukuran kecil. Sedangkan kapal ukuran besar selalu berhasil kabur saat akan

“Saya setuju dengan Menko Kemaritiman agar jika ada pelanggaran karena *illegal fishing* dalam bentuk pencurian ikan di wilayah perairan laut Indonesia, sebaiknya tidak usah ditenggelman kapalnya. Namun kapal itu disita menjadi milik negara dan dihibahkan ke nelayan Indonesia,”

ditangkap. “Selama ini pun kapal-kapal asing yang ditenggelman banyak yang berukuran kecil saja. Tidak seluruh kapal asing yang melakukan *illegal fishing* bisa ditangkap oleh kapal pengawas,” sambungnya.

Hal ini perlu menjadi perhatian Menteri Kelautan dan Perikanan agar lebih berorientasi pada asas manfaat dalam mengeluarkan kebijakan. Ketimbang kapal pencuri ikan ditenggelman, akan lebih bagus jika kapal tersebut disita dan dihibahkan ke nelayan lokal. ■ (hs/sc)



Foto: Jember/jk

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi

DPR Dorong Hukuman bagi Pelaku Predator Anak

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti mendorong pihak aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku predator anak. Hal tersebut diungkapkannya saat dihubungi Parlementaria, Senin (8/1).

“Saya sedih, sekaligus marah dan prihatin mendengar adanya kasus pedofilia dengan korban sebanyak 25 anak. Saya juga mengapresiasi jajaran kepolisian yang telah berhasil membongkar kasus tersebut. namun tentunya tugas aparat penegak hukum tidak berhenti di sini, saya berharap dan mendorong agar aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku, agar menimbulkan efek jera kepada pelaku, sekaligus memberi contoh kepada orang lain untuk berpikir ulang jika ingin melakukan hal serupa,” ungkap Endang.

Dijelaskan Endang, perilaku pedofilia

itu tidak hanya merusak masa depan anak-anak. Tapi juga memberikan efek lain yang lebih membahayakan lagi, yakni kemungkinan para korban akan menjadi pelaku pedofilia di kemudian hari. Namun untuk menghindari itu semua perlu perhatian yang ekstra dari orangtua, keluarga dan lingkungan.

“Dalam kasus yang terkait anak-anak, jelas peran orangtua sangat dibutuhkan, yakni untuk lebih mendekatkan diri pada anak sehingga anak menjadi lebih terbuka kepada orang tua. Disaat itulah orangtua dapat mengamati perilaku dan kebiasaan anak sekaligus memberikan pendidikan dan pelajaran bagaimana harus memproteksi atau melindungi diri dari orang lain,” paparnya.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menyadari bahwa usia anak 13-14 tahun notabene merupakan masa peralihan dari anak-anak ke remaja awal, sekaligus masa dimana anak menjadi sulit untuk diberitahu. Namun dengan kedekatan orang tua yang ikut memposisikan diri sebagai teman anak, akan memudahkan anak untuk tidak takut dan ragu bercerita tentang berbagai hal. Di saat itulah orang tua dapat mendeteksi secara dini apa yang terjadi dalam kehidupan sang anak, plus memberi pelajaran ke anak untuk selalu waspada terhadap orang lain.

Sementara itu terkait peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merupakan mitra kerja Komisi VIII DPR RI, Endang mengakui bahwa selama ini





Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti

kewenangan dari mitra kerjanya itu hanya sebatas melakukan pendataan dan menampung laporan, jika kemudian ditemukan kasus, baru melakukan pendampingan.

“Sebenarnya masih banyak yang bisa dilakukan KPAI selain melakukan pendataan, menampung laporan, dan baru kemudian melakukan pendampingan terhadap korban jika ditemukan kasus terhadap anak. Misalnya dengan mengadakan sosialisasi ke lingkungan rumah tangga dan ke sekolah agar tidak terjadi lagi kasus serupa, predator anak, pelecehan seksual terhadap anak ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Dan tentunya sosialisasi ini juga tidak semata merupakan tugas dari KPAI, namun juga tugas seluruh pihak, termasuk orangtua pastinya, guru-guru, tokoh agama dan masyarakat,” pungkasnya. ■ (ayn/sc)

Foto: Etno/jk

Calon Kepala Daerah Diminta Kedepankan Etika Politik

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta kepada seluruh Calon Kepala Daerah untuk mengedepankan etika politik pada pertarungan Pilkada Serentak 2018 mendatang.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

Foto: Aqsa/jk

Sutan menegaskan, agar Calon Kepala Daerah tidak menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Fenomena politik uang, isu SARA, budaya mahar, intimidasi pemilih, hingga politisasi birokrasi merupakan bentuk-bentuk menghalalkan segala dalam meraih kemenangan dan kekuasaan.

“Kenyataan ini bukan hanya mencederai kualitas dari demokrasi itu sendiri tapi merusak tatanan pemerintahan yang terpilih nantinya,” tegasnya saat dihubungi Parlemenaria via telepon, Rabu (10/1).

Politisi F-Gerindra itu memastikan, pemerintahan yang bersih dan birokrasi yang berwibawa, tidak akan lahir jika proses politiknya tidak baik, yang penuh intimidasi ataupun politik uang.

“Katakanlah ada seorang kepala daerah yang mengeluarkan uang hingga Rp 10 sampai 15 miliar untuk politik,

Kenyataan ini bukan hanya mencederai kualitas dari demokrasi itu sendiri tapi merusak tatanan pemerintahan yang terpilih nantinya

logikanya uang siapa dan bagaimana mengembalikannya, disinilah awal tata kelola yang tidak baik itu terjadi,” tandas politisi asal dapil Jambi itu. ■ (sf)

Infrastruktur Merupakan Lokomotif Pembangunan

Pemerintah Indonesia masih fokus untuk memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur pada tahun 2018. Saat ini Indonesia juga sudah mendapatkan kenaikan peringkat *investment grade* (BBB) atau layak investasi dengan *outlook* stabil dari Lembaga Pemeringkat Kredit, S&P Global Ratings.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin Mohamad Said menyampaikan bahwa dengan adanya peningkatan peringkat *investment grade*, berarti investasi akan semakin banyak ke Indonesia.

“Dengan fokus pembangunan infrastruktur, pemerintah ingin ada kemajuan dan peningkatan dibidang infrastruktur, karena infrastruktur adalah salah satu lokomotif pembangunan. Indonesia menjadi makin dipercaya sebagai salah satu negara yang sangat memberi perhatian terhadap investor,” ujar Muhidin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1).

Politisi F-PG itu menilai, besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur, karena

pembangunan infrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Jika masih ada kekurangan atau permasalahan dari segi teknis, menurutnya hal itu masih wajar, sepanjang persoalan tersebut masih bisa diatasi.

Menanggapi beberapa kejadian buruk yang terjadi dalam proyek pembangunan infrastruktur seperti peristiwa runtuhnya crane, atau jembatan yang jatuh, Muhidin mengatakan, untuk mendukung besarnya perhatian pemerintah di bidang infrastruktur, maka diperlukan juga sumber daya manusia yang cukup.

“Jatuhnya crane itu karena faktor kelalaian, dan bukan faktor teknis. Inilah yang perlu diberikan perhatian



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin Mohamad Said

Foto: Inam

khusus, agar tidak lagi terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Pelaksanaan infrastruktur harus benar-benar memperhatikan keselamatan pekerjaan,” tutur politisi asal dapil Sulawesi Tengah itu. ■ (dep/sf)

DPR Sesalkan Keputusan PPN 5 Persen oleh Arab Saudi

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong menyesalkan keputusan penetapan dan pemberlakuan PPN 5 persen atas jemaah ibadah Haji dan Umrah seluruh dunia, yang diberlakukan secara sepihak oleh Pemerintah Arab Saudi.

Selain itu, Ali juga menyayangkan kebijakan Pemerintah Arab Saudi itu tanpa melakukan konsultasi atau meminta pendapat terlebih dahulu kepada negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang mengirimkan jemaah ibadah Haji maupun Umrah setiap tahunnya. Pihaknya pun belum menemukan rumusan untuk membatalkan kebijakan itu.

“Karena pada satu sisi, pelaksanaan ibadah Haji dan Umrah itu keterkaitannya dengan ibadah, dan bukan usaha bisnis. Meskipun dalam pelaksanaannya, melibatkan proses penunjang dalam bisnis,” ucap Ali Taher di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1).

Politisi F-PAN itu menegaskan, dalam waktu dekat, Komisi VIII akan memutuskan agenda-agenda rapat penetapan pembentukan Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), yang termasuk di dalamnya akan diagendakan mengenai masalah kenaikan PPN sebesar 5 persen itu.

“Memang kalau melihat dari definisinya, maka PPN itu terkait dengan persoalan jasa antara kegiatan-kegiatan ekonomi atau kegiatan antara bisnis produsen dan konsumen. Pertanyaannya adalah apakah jemaah Haji dan Umrah itu dianggap sebagai jemaah atau konsumen,

Pemerintah Perlu Kaji Pembangunan Perguruan Tinggi Asing

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah meminta pemerintah, dalam hal ini Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mengkaji secara komprehensif terkait masuknya perguruan tinggi (PT) asing di Indonesia dengan penyertaan modal dominan, hingga 67 persen.

“Pembangunan PT asing ini perlu dihitung dampaknya, perlu kehati-hatian. Kami minta Kemenristek Dikti mengkaji ulang hal ini secara komprehensif,” tegas Ferdiansyah kepada Parlemen melalui pesan singkat, Jakarta (8/1).

Terlebih, diketahui salah satu langkah yang akan ditempuh adalah menciutkan jumlah perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia yang saat ini berjumlah 4,575 institusi akan dikurangi menjadi sekitar 3.500 institusi.

“Penutupan atau penggabungan perguruan tinggi ini akan memberikan dampak. Kita harus perhatikan dampak terhadap mahasiswanya, dosen, serta bagaimana perhitungan penggabungan aset kelembagaan,” ungkapnya.

Jangan hal ini memberatkan, misalnya,

sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,” ujarnya.

Ali menyampaikan, Komisi VIII akan mengundang Kementerian Agama dan instansi terkait untuk membicarakan pemecahan masalah atas kenaikan PPN 5 persen itu. Persoalan ibadah Haji dan Umrah tidak bisa diukur dengan nilai uang, tetapi kepuasan jemaah yang lebih penting.

“Kalau kenaikan PPN 5 persen untuk sektor yang lain masih bisa kita pahami, tetapi kalau jemaah yang dikenakan PPN, maka inilah yang menjadi masalah. Timbul pertanyaan lainnya juga, yaitu mau melekatkan di anggaran yang mana, apakah masuk *indirect cost* (beban APBN) atau masuk dalam *direct cost* (biaya langsung). Sementara masalah PPN ini adalah menyangkut beban individual,” ungkap politisi asal dapil Banten itu. ■ (dep/sf)

Ferdi memberikan contoh, perguruan tinggi di Jawa Barat di Tasikmalaya digabung ke Majalengka. “Ini kan jauh, yang seperti ini juga harus dihitung. Maka dari itu perlu dikaji secara komprehensif,” tuturnya.

Politisi partai Golkar ini tidak melarang adanya pembangunan perguruan tinggi asing untuk mendongkrak kualitas pendidikan. Namun, hal ini harus dilakukan secara selektif.

“Harus ada manfaat terhadap Indonesia, misalnya transfer pengetahuan atau teknologi dan jangan sampai mematikan perguruan tinggi yang lainnya. makanya perlu dikaji secara komprehensif,” jelasnya.

Diketahui, pemerintah memberikan lampu hijau kepada perguruan tinggi asing untuk beroperasi di Indonesia.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah

Foto: Krean/jk

Jika tidak segera berbenah, perguruan tinggi di dalam negeri beresiko terlindas persaingan global. ■ (rum/sc)



Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong

Foto: Arif/jk

Pemkot Padang Temui Komisi III Soal Sengketa Tanah

Perwakilan Pemerintah Kota Padang menemui Komisi III DPR RI untuk mengadukan persoalan pelik menyangkut konflik pertanahan yang belum kunjung selesai, walau sudah ada putusan pengadilan. Komisi III diimbau mendatangi lokasi sengketa ini untuk mengetahui lebih jelas persoalan yang membelit tanah masyarakat tersebut.

Delegasi Pemkot Padang diterima langsung dalam *bearing* pertanahan di Komisi III, Rabu (10/1) Anggota Komisi III Eddy Wijaya Kusuma, H.R. Muh. Syafi'i dan Abdul Wahab Dalimunthe memimpin pertemuan tersebut. Delegasi Pemkot Padang memaparkan persoalan yang dihadapi. Objek tanah sengketa yang dipersoalkan adalah putusan Landraad No.90/1931 bertanggal 16 Mei 1931. Warga di empat Kelurahan di Padang ikut terdampak, yaitu Kelurahan Air Pacah, Bungo Pasang, Koto Panjang, dan Tunggul Hitam.

Perkara bermula dari adanya gugatan Naamlozed Vennootschap Exploitarie Van Onroerende Goederen selaku penggugat terhadap Makboot selaku tergugat I dan Oesoos selaku tergugat II. Objek perkara berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tunggul Hitam. Tanah sengketa ini berada dalam areal eigendom veronding1794. Tanah yang sudah sempat diperjualbelikan itu, kini menimbulkan masalah baru.

Pada 15 Desember 1982 muncul nama Jinun yang mengaku sebagai ahli



Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan

Objek perkara berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tunggul Hitam. Tanah sengketa ini berada dalam areal eigendom veronding1794

waris dan menggugat ke Pengadilan Negeri Padang Klas I yang akhirnya dikabulkan. Persoalan ini berlarut-larut tak selesai hingga kini. Adalah Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan yang menyerukan agar Komisi III mendatangi lokasi sengketa untuk mengetahui dari dekat pokok persoalannya. Dalam perkara tanah, rakyat kecil kerap dikalahkan, karena tak punya uang untuk memperkarakannya.

“Mereka (rakyat kecil) datang bukan untuk bicara hukum. Mereka datang mengajukan fakta hukum yang harus diperjuangkan. Semua Keputusan Pengadilan bisa dibeli. Komisi III harus datang ke sana. Yang bermain dengan kasus ini harus diselesaikan. Tidak ada urusan tanah yang dimenangkan rakyat kecil, karena mereka tidak punya uang,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Arteria yang juga berprofesi sebagai advokat ini, sangat berpengalaman menangani perkara tanah yang melibatkan rakyat kecil. Katanya, publik jangan begitu saja percaya pada Putusan Pengadilan yang mengadili sengketa tanah. Apalagi sengketanya melibatkan pemodal besar.

“DPR harus melakukan eksaminasi kembali apakah benar putusan itu dihadirkan untuk rakyat. Kita pecat yang bermain-main dengan kasus ini. Kalau ada yang menunggangi kita bersihkan,” kelakarnya di hadapa rapat Komisi III. ■ (mh/sc)



Pemerintah Wajib Vaksinasi Difteri Anak Indonesia

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena mengimbau semua anak Indonesia wajib mendapatkan semua vaksinasi, terutama vaksin difteri. Mengingat, serangan penyakit difteri juga sudah dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) di Indonesia. Pemenuhan vaksinasi itu juga sejalan dengan Undang-undang (UU) Perlindungan Anak.

“Jadi, kalau ada orangtua yang tidak memberikan imunisasi atau pihak pemerintah yang tidak memberikan perhatian, hal itu sudah melanggar UU Perlindungan Anak, karena vaksin BCG dan pelarut BCG, vaksin Pentabio (DTTP, HB-HIB) dan vaksin TT sifatnya wajib,” jelas Ermalena, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1).

Untuk pemenuhan vaksinasi, lanjut Ermalena, harus ada evaluasi terhadap program imunisasi secara komprehensif. Baik dari sistem informasi kesehatan, distribusi vaksin hingga revitalisasi kader-kader yang selama ini menjemput bola untuk pelaksanaan vaksinasi.

“Sistem informasi kesehatan perlu diperkuat, karena banyak orang tidak tahu dampak bagi anak yang tidak mendapatkan vaksin. Selain itu, sistem distribusi dari pabrik hingga ke tangan masyarakat juga perlu dievaluasi karena vaksin ini memerlukan perlakuan khusus, misal temperaturnya yang harus dijaga,” katanya.

Di sisi lain, mengenai isu vaksin difteri yang belum memiliki label halal, Politisi F-PPP itu meminta Kementerian Kesehatan untuk meluruskan informasi yang saat ini simpang siur di masyarakat. Pihaknya meyakini bahwasannya Kemenkes sudah melakukan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Dalam memberikan vaksin, saya yakin Kemenkes sudah melakukan koordinasi dengan



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena

Foto: Oji/jk

MUI, maka dari itu Kemenkes perlu meluruskan informasi yang tidak benar ini. Karena vaksinasi ini kan sudah dijalankan, kok baru ada isunya,” ungkap politisi asal dapil NTB itu, seraya

mengatakan pihaknya akan segera melakukan Raker dengan Menteri Kesehatan.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR Ayub Khan. Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, informasi mengenai vaksin difteri yang belum memiliki label halal hanya karena kurangnya koordinasi Kemenkes dan MUI.

“Vaksin ini halal, tapi karena tidak ada koordinasi antara Kemenkes dan MUI, hal itu menimbulkan ada keraguan dari masyarakat kalau vaksin ini tidak halal. Makanya, pemerintah perlu meluruskan, karena kalau tidak tujuan pemerintah mengurangi KLB bisa tidak tercapai karena ada isu vaksin ini tidak halal, padahal vaksinasi sifatnya wajib,” tegasnya. ■ (rnm, sf)

Sistem informasi kesehatan perlu diperkuat, karena banyak orang tidak tahu dampak bagi anak yang tidak mendapatkan vaksin.

DPR Apresiasi Pembentukan Satgas Anti Politik Uang

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengapresiasi inisiatif Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Politik Uang (Antimoney Politic) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Satgas ini akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani praktik politik uang yang diprediksi akan ramai menjelang Pilkada 2018.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera

“Kami mengapresiasi inisiatif Polri membentuk satgas untuk menekan *money politic*, karena faktanya *money politic* memang mengancam demokrasi,” ungkapnya sebelum rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1).

Namun politisi F-PKS itu mengingatkan, selama ini sudah dibangun sistem pencegahan politik uang dengan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Maka dari itu, pihaknya berharap satgas nantinya tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi melakukan koordinasi dengan Gakkumdu yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017.

“Kami harap niat baik ini dapat dilaksanakan dengan baik. Niat Polri baik, tapi kalau dilakukan tanpa koordinasi dengan Gakkumdu dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang buruk,”

tandas politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Ace Hasan Syadzily. Menurut politisi F-PG itu, prinsip pembentukan satgas politik uang yang diinisiasi Polri sangat baik. Hal ini menjadi upaya dalam menciptakan Pilkada yang bersih dalam memilih pemimpin daerah berdasarkan kapasitas, kompetensi dan rekam jejak calon.

“Ini baik. Tapi kita tahu, Bawaslu sudah diberi kewenangan untuk menindak secara tegas pasangan calon, tim sukses atau simpatisan yang sengaja melakukan *money politic*. Dalam UU yang baru tentang Pemilu maupun Pilkada, kewenangan Bawaslu sangat kuat untuk menindak siapapun yang melakukan *money politic*, maka satgas juga perlu berkoordinasi dengan Bawaslu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, politisi asal dapil Banten itu juga berharap ada upaya yang serius dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan sosialisasi pencegahan terhadap upaya yang mengarah pada tindakan *money politic*, agar proses pilkada bisa menghasilkan pemimpin yang sesuai harapan. ■ (nm/sj)

Prinsip pembentukan satgas politik uang yang diinisiasi Polri sangat baik. Hal ini menjadi upaya dalam menciptakan Pilkada yang bersih dalam memilih pemimpin daerah berdasarkan kapasitas, kompetensi dan rekam jejak calon.



Negara Belum Maksimal Antisipasi Narkoba di Indonesia

Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi menilai, negara harus ikut terlibat secara maksimal mengantisipasi perkembangan narkoba di negeri sendiri. Selama ini ia melihat, negara masih belum maksimal dalam melakukan tindakan preventif atau pengantisipasi terhadap masuknya narkoba dari luar. Hal tersebut diungkapkannya sesaat sebelum memasuki ruang Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1).



Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi

“Persoalan narkoba menurut saya akan menjadi lebih besar jika negara tidak mengantisipasinya secara maksimal. Peralnya, ada 20 negara di dunia yang melihat Indonesia sebagai pasar yang sangat besar,” ujar Taufiq.

Dijelaskannya, bagi pelaku narkoba internasional, Indonesia kerap menjadi pasar yang sangat besar pertama sebagai pasar uji coba, karena banyaknya narkoba jenis baru yang dihasilkan, dan Indonesialah yang kerap dijadikan pasar uji coba bagi jenis narkoba baru tersebut. Ketika proses uji coba dilakukan, maka Indonesia juga akan dijadikan

pasar *riil* atas jenis narkoba baru yang sudah teruji di Indonesia itu sendiri.

Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Taufiq, perlu cara penanganan yang lebih maksimal dari negara. Diantaranya dengan membangun laboratorium nasional yang bisa dijadikan tempat pengujian bagi jenis narkoba baru. Selama ini untuk mengetahui bahwa obat yang dibawa seseorang dari luar negeri itu merupakan narkoba jenis baru, pemerintah atau aparat harus mengirimkannya terlebih dahulu ke Australia, baru mengetahui hasilnya setelah kurang lebih 10 harian.

“Namun dengan adanya laboratorium nasional nanti, maka pemerintah akan langsung mengetahui bahwa obat yang dibawa seseorang dari luar negeri itu merupakan narkoba jenis baru. Oleh karena itu saya mendorong pemerintah untuk bisa membangun lab nasional. SDM dan anggaran kita cukup mampu kok,” ujar politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini.

Selain itu, ditambahkan Taufiq, sejatinya Indonesia sudah memiliki mesin sidik jari atau *finger print* yang ditempatkan di setiap bandar udara dan pelabuhan tempat keluar masuk warga negara asing. Dengan begitu akan terdeteksi siapa-siapa saja warga negara asing yang sering keluar masuk Indonesia. Dengan demikian akan lebih memudahkan aparat untuk memantau bisnis mereka, terutama yang terkait dengan bisnis narkoba. ■ (ayu/sc)

Bagi pelaku narkoba internasional, Indonesia kerap menjadi pasar yang sangat besar pertama sebagai pasar uji coba, karena banyaknya narkoba jenis baru yang dihasilkan, dan Indonesialah yang kerap dijadikan pasar uji coba bagi jenis narkoba baru tersebut.



<http://bulungan.prokal.co>

DPR Minta BI Tindak Tegas Penggunaan Mata Uang Asing di NKRI

Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar berharap Bank Indonesia (BI) bertindak tegas jika memang ditemukan mata uang asing yang digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI. Hal itu diungkapkannya saat ditanya wartawan terkait berita ditemukannya mata uang Cina, Yuan yang dipakai beberapa anggota masyarakat di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

“Dalam Undang-Undang Mata Uang sudah jelas dimana rupiah menjadi mata uang tunggal yang digunakan di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sehingga jika ada yang menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayaran di NKRI tentu Bank Indonesia harus bertindak tegas, apakah mata uang asing itu dikeluarkan oleh perusahaan atau digunakan oleh orang per orang. Dan sangat berbahaya jika digunakan sebagai alat pembayaran. Kalau sekedar *money changer* mungkin tidak masalah, tapi tidak boleh sebagai alat transaksi,” papar Willgo sesaat sebelum memasuki ruang Sidang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1).

Lebih lanjut Willgo mengatakan bahwa hal tersebut juga terkait dengan kedaulatan negara. Oleh karena itu ia berharap agar Bank Indonesia lebih meningkatkan lagi pengawasannya, termasuk di wilayah-wilayah perbatasan.

Tidak hanya itu, sebagai pemegang otoritas pengawasan uang asing dan rupiah, BI harus hadir dalam *leading sector* pengawasan keuangan dengan bersinergi serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal ini aparat Kepolisian.

“Dalam menjalankan perannya sebagai pengawas keuangan dan perbankan, BI tentu tidak bisa melakukan tindakan yang melampaui perannya tersebut. Untuk itu BI harus bersinergi, berkoordinasi dan bekerjasama dengan aparat hukum, aparat Kepolisian untuk membantu melakukan penindakan terkait adanya penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI,” jelas Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Tindakan yang tegas dari BI dan aparat Kepolisian sangat diperlukan agar jangan sampai hal serupa terjadi di daerah lainnya di wilayah NKRI. Ditegaskannya,



Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar

jangan karena daerah tersebut diisi oleh komunitas WNA (warga negara asing) tertentu yang bekerja di Indonesia, kemudian semau-maunya mereka menggunakan mata uang mereka (mata uang asing) di wilayah NKRI. Pasalnya, hukum Indonesia berlaku untuk seluruh wilayah NKRI, termasuk Undang-Undang Mata Uang yang memang juga harus diikuti dan dipatuhi oleh WNA yang ada di NKRI. ■ (ayul/sc)



Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate

Semua LJK Wajib Sampaikan SLIK Untuk Penataan

Menyusul seruan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar semua Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menyampaikan laporan keuangannya berupa Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK), legislator di parlemen menyambut baik hal tersebut. Pada dasarnya semua LJK wajib membuat SLIK agar diketahui publik sebagai bentuk transparansi.

Plt Sekjen DPR Pimpin Sertijab antar Kepala Biro



Plt Sekjen DPR Damayanti memimpin sertijab rotasi antar Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan dan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen.

“Kali ini, Deputi Persidangan mendapat kesempatan yang baik, tiga orang personelnnya yaitu Pak Tahapari di Biro Pemberitaan Parlemen, Pak Djaka di Biro Kesekretariatan Pimpinan dan Pak Djustiawan yang tadinya Kepala Bagian Penerbitan menjadi Kepala Biro Umum, ini merupakan prestasi yang baik bagi kita semua,” kata Maya panggilan akrabnya.

Acara yang dilaksanakan di ruang rapat Sekjen DPR RI ini dihadiri oleh seluruh kepala bagian dan kepala sub bagian dalam Biro Kesekretariatan Pimpinan dan Biro Pemberitaan Parlemen guna untuk menyaksikan sertijab tersebut.

“Sebenarnya rotasi ini hanya menyegarkan saja dan memberi pengayaan pada masing-masing yang di rotasi, mau Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNP) harus kerja sama secara kompak, Insya Allah semua menghasilkan hasil yg baik,” tambah Maya.

Maya menambahkan, kedua biro tersebut merupakan biro yang sangat strategis, sehingga ia berpesan untuk terus melanjutkan apa yang sudah berjalan dengan baik dan ditingkatkan serta permudah apa yang bisa dipermudah.

“Saya juga menyampaikan bahwa dimanapun seseorang ditempatkan maka harus mampu melaksanakan amanah yang harus diemban, dimana tugas dan fungsinya tetap harus dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan janji sumpahnya,” tutup Maya. ■ (chas/sc)

Plt Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti memimpin langsung acara serah terima jabatan (Sertijab) rotasi antar Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Mereka adalah Djaka Dwi Winarko sebagai Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan dan Yohannes O.I. Tahapari sebagai Kepala Biro Pemberitaan Parlemen di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1).

OJK sendiri menargetkan pada 2022 semua LJK besar sudah menyampaikan SLIK secara berkala. Pengecualian ditujukan bagi lembaga keuangan mikro dan koperasi simpan pinjam. Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate yang ditemui sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR berkomentar, SLIK sudah jadi keharusan, karena ini menyangkut keterbukaan publik dengan menghimpun dana masyarakat.

“Sekarang ini banyak laporan-laporan keuangan yang tertutup dan rakyat tidak paham. Akibatnya, banyak lembaga pembiayaan bodong yang terjadi. Di daerah itu banyak sekali, seperti

koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat secara besar,” ujar politikus Partai Nasdem tersebut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1).

Sekarang ini banyak laporan-laporan keuangan yang tertutup dan rakyat tidak paham. Akibatnya, banyak lembaga pembiayaan bodong yang terjadi.

Dimintai pendapatnya soal OJK yang belum mewajibkan lembaga keuangan mikro, menengah, dan kecil untuk menyampaikan SLIK, Johnny menjawab, saat ini memang sedang dimulai dari lembaga keuangan yang besar dahulu. Saatnya nanti lembaga keuangan mikro seperti koperasi juga wajib menyampaikan SLIK kepada publik.

“Ini mulai dari yang besar dulu. Nanti yang kecil juga harus. Yang dibuat sekarang ini untuk penataan agar baik. Jangan dianggap mempersulit. Justru kita punya kepentingan lembaga keuangan kecil, menengah, dan mikro tata kelolanya menjadi baik dan berkembang,” tutupnya. ■ (mh/sc)

Marwan Dasopang Gantikan Abdul Malik Haramain Jabat Wakil Ketua Komisi VIII



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyerahkan Palu Sidang kepada Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, usai dilantik



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memimpin acara rapat Komisi VIII DPR dalam rangka menetapkan Marwan Dasopang sebagai Wakil Ketua Komisi VIII menggantikan Abdul Malik Haramain dari Fraksi PKB di ruang Rapat Komisi VIII Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1).

Menurut Fahri Hamzah, sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU No.42/2014 tentang UU MD3 diatur bahwa pemilihan pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin Pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.

“Berdasarkan surat dari Fraksi PKB DPR tanggal 7 Desember 2017 perihal pergantian Wakil Ketua Komisi VIII dari unsur PKB semula Abdul Malik Haramain, digantikan oleh Marwan Dasopang, sehingga komposisi Pimpinan Komisi VIII mengalami perubahan,” kata Fahri.

Dengan demikian komposisi Pimpinan Komisi VIII adalah Ketua M. Ali Taher Parasong dari F-PAN dengan Wakil-wakil Ketua Noor Achmad (FPG), Sodik Mudjahid (F Gerindra), Marwan Dasopang (FKB) dan Iskan Qolba Lubis (FPKS).

Selanjutnya Fahri Hamzah menanyakan kepada rapat Komisi VIII apakah komposisi Pimpinan Komisi VIII masa bakti 2018-2019 tersebut disetujui. Dijawab serempak “Setuju” menandai sahnya Pimpinan Komisi VIII tersebut, dilanjutkan penyerahan palu Pimpinan kepada Marwan Dasopang yang didampingi unsur Pimpinan Komisi VIII lainnya.

Kepada para anggota Komisi VIII Pimpinan DPR Korkesra ini menyampaikan pesan terkait perubahan politik dan kebijakan ekonomi di Arab Saudi, ada banyak sekali *concern* dan peringatan yang akan mempengaruhi tugas utama Komisi VIII khususnya mitra Kemenag dalam rangka Ibadah Haji dan Umrah. Lebih khusus terkait dengan Badan Pengelolaan Keuangan Haji yang sudah terbentuk bisa menjadi perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi VIII. ■ (mp/ss)

Foto: Jaka



Wakil Ketua DPR Korkesra Fahri Hamzah menerima audiensi Ulama Se-Madura terkait revisi KUHP agar LGBT dimasukkan kedalam KUHP sekaligus meminta persekusi ulama untuk di tindak tegas, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/1). *Foto: Andri/iw*



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Studi Ilmiah SMK Wijaya Plus di Gedung DPR, Rabu (10/1). *Foto: Jaka/iw*



Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI, Johnson Rajagukguk menerima kunjungan DPRD Kabupaten Bengkayang di Ruang Rapat BK DPR, Kamis (11/1). *Foto: Kresno/iw*